

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) selama lima minggu dapat disimpulkan bahwa hasil yang didapat selama kegiatan PKPA di Apotek Pahala Batu Mulia adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tugas dan tanggung jawab apoteker dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian di apotek dan mampu berperan aktif dalam memberikan pelayanan kefarmasian kepada pasien.
2. Mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman mengenai pengelolaan obat dalam rangka menjalankan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan kesempatan untuk melihat, mengamati, mempelajari dan mempraktekkan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek baik dari segi pelayanan kepada pasien maupun dari segi manajerial dalam mengoperasikan apotek.
4. Melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewajiban secara profesional, disiplin dan berwawasan luas dalam dunia kerja.
5. Mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dari bangku perkuliahan dengan keadaan sebenarnya di lapangan, sehingga dapat menumbuhkan rasa percaya diri, hal tersebut juga mampu meningkatkan *soft skill* dari seorang calon apoteker untuk melakukan interaksi dan memberikan pelayanan kefarmasian yang terbaik dengan berorientasi kepada kesembuhan pasien.

5.2 **Saran**

Setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala Batu Mulia, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Kualitas pemberian Konseling, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada pasien hendaknya ditingkatkan agar pasien dapat memahami cara penggunaan obat yang benar, aman, dan tepat serta dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap penggunaan obat sehingga keberhasilan terapi dapat tercapai.
- 2 Apotek Pahala Batu Mulia Farma diharapkan dapat mengaplikasikan dan meningkatkan penggunaan *Patient Medication Record* (PMR) tidak hanya untuk beberapa penyakit khusus saja, namun juga berbagai penyakit lainnya sebagai salah satu wujud pelayanan kepada pasien juga untuk menjalankan peran apoteker di tengah-tengah masyarakat.
- 3 Apotek Pahala Batu Mulia diharapkan menyediakan ruang khusus untuk konseling agar pasien dapat lebih leluasa untuk menanyakan hal-hal terkait keluhan dan penyakit yang diderita serta pengobatannya tanpa khawatir diketahui oleh pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2020, *MIMS Petunjuk Konsultasi Indonesia, Edisi 20*, PT Bhuna Ilmu Populer, Jakarta.
- Blenkinsopp, A., Duerden, M., and Blenkinsopp, J., 2018, *Symptoms in the Pharmacy: A Guide to the Management of Common Illnesses, 8th ed.*, John Wiley & Sons.
- BNF, 2022, *British National Formulary, 80th ed.*, BMJ Group, London.
- BNFC, 2020, *British National Formulary for Children 2020-2021*, BMJ Group, London.
- <https://go.drugbank.com/drugs> diakses pada tanggal 1 November 2022
- <https://reference.medscape.com/drug-interactionchecker> diakses pada tanggal 1 November 2022
- Kantar, A., Klimek, L., Cazan, D., Sperl, A., Sent, U., Mesquita, M., 2022, An Overview of Efficacy and Safety of Ambroxol for The Treatment of Acute and Chronic Respiratory Disease With A Special Regard to Children, *Multidisciplinary Respiratory Medicine*, 15(11), 1-11.
- <https://www.kemkes.go.id/article/view/22011800003/upaya-ibu-cegah-anak-stunting-dan-obesitas.html> diakses pada tanggal 17 oktober 2022
- Kementerian Kesehatan RI, 2011, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan,

- Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2017, Surat Edaran Nomor HK.02.02/MENKES/24/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

- Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2019, Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2021, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2021, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Lacy, F. C., Lora, L. A., Morton, P. G., and Leonard, L. L., 2009. Drug Information Handbook 17th ed. American Pharmacist Association, New York. (2009): Print
- McEvoy, G.K., 2011, AHFS Drug Information, American Society of Health System Pharmacists, Maryland.
- Pemerintah RI, 1945, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.
- Pemerintah RI, 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tentang Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Pemerintah RI, 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.